

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedoman akuntansi digunakan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah format laporan keuangan daerah atas satu tahun anggaran. Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan diterapkannya hal ini ialah guna mempromosikan akuntabilitas dan mendorong peningkatan pengungkapan laporan keuangan agar menjadi lebih baik. Kepatuhan pada standar akuntansi, kemampuan SDM serta dukungann sistem akuntansi saat ini berdampak signifikan terhadap keakuratan pelaporan keuangan pemerintahan. Selain itu, kondisi ini juga tidak terlepas dari kekuatan perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Publik dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dengan data keuangan yang handal (Arista, 2018). Laporan keuangan disajikan oleh pemerintah sebagai alat pengendalian, penilaian kinerja, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan. Sehingga pemerintah diwajibkan menyediakan laporan keuangan (*stakeholder*) yang berkualitas tinggi sehingga para pemangku kepentingan dapat mempergunakan dan memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan

keuangan pemerintahan buruk dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik (pemerintah) dan kualitas dalam mengambil keputusan yang telah diaplikasikan secara maksimal akan menjadi buruk (Aziiz Ramadhani, 2018).

Meningkatnya standar akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelaksanaan akuntabilitas publik, khususnya melalui laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintah daerah harus meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan akuntabilitas publik dan menyediakan informasi yang berkualitas. Sebuah laporan keuangan dapat menentukan apakah suatu kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Wati et al., 2022).

Kompetensi menyangkut kewenangan tiap individu dalam melaksanakan tugas ataupun mengambil keputusan sesuai dengan fungsinya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai wajib mendukung penerapan strategi organisasi serta mampu mendukung setiap perubahan yang dilaksanakan

oleh manajemen. Dengan maksud lain keahlian yang dimiliki setiap individu dapat mendukung sistem kerja berlandaskan tim (Herman, 2011).

Catatan informasi keuangan dari pemerintah daerah pada suatu periode akuntansi adalah sebuah laporan keuangan. Kompetensi tentunya berkaitan erat dengan SDM dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah membutuhkan SDM yang mempunyai keahlian pada bidang tata kelola organisasi, keuangan daerah, serta akuntansi pemerintahan untuk memperoleh laporan keuangan daerah yang lebih baik (Arista, 2018). Menurut Ihsanti (2014) kemampuan dan keahlian setiap individu di dalam sebuah sistem lembaga atau suatu organisasi untuk mempraktekkan pengetahuan dan kemampuannya dan melaksanakan kewajibannya untuk mencapai tujuan mereka dengan efektif serta efisien dikenal sebagai kompetensi SDM.

Laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan penuh keyakinan karena didasarkan pada data dan informasi yang telah dipersiapkan dengan baik secara akurat, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Laporan keuangan yang menyajikan sebuah informasi aktual dan akurat berdampak baik pada kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai indikator yang baik dari konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Selain pemahaman kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi terutama yang digunakan oleh organisasi di sektor publik merupakan komponen penting bagi keberhasilan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang baik, dibutuhkan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan Negara atau daerah. Proses penerapan aplikasi ini membutuhkan suatu sistem informasi keuangan. Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi ke para pengguna (Herman, 2011).

Penggunaan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menaikkan akuntabilitas serta keandalan pengelola keuangan pemerintah melewati penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, merupakan faktor penting lain yang secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi menjadi satu cara dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang sejalan dengan standar akuntansi (Arista, 2018). Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011) menyatakan bahwa diawali dengan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa tahapan yang dapat diselesaikan dengan manual ataupun dengan bantuan program komputer, dan diakhiri dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD. Karena perannya dalam menentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan, keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance agar mendorong keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (2004) menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota, wajib membuat dan menyusun laporan keuangannya sendiri. Keuangan Negara wajib dikaji oleh aparatur Negara yang kompeten secara tertib, sejalan dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Negara yang efektif. Untuk mencapai tujuan organisasi, suatu instansi juga memerlukan sistem pengendalian intern dan pengawas keuangan yang kuat, pada hal ini anggota DPRD menjadi salah satu peran dalam fungsi pengawasan tersebut (Abdul Choliq, 2020).

Kualitas pengungkapan laporan keuangan tentunya akan meningkat dengan dukungan sistem pengendalian internal yang kuat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, (2008) pengendalian intern mencakup beberapa kebijakan, antara lain: (1) terkait dengan pencatatan keuangan; (2) memberi keyakinan memadai bahwasanya laporan keuangan sudah diatur sejalan dengan standar akuntansi; (3) memberi keyakinan memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Pada pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah BPK berhasil menemukan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan serta

mengidentifikasi sejumlah data yang tidak sesuai. Berdasarkan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I Tahun 2022 terhadap 541 LKPD, mengungkapkan sebanyak 5.366 permasalahan utama sistem pengendalian intern dan permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah. Seperti yang tertera pada tabel 1.1, terdapat 938 kelemahan struktur pengendalian intern, 1.637 kesalahan sistem pengendalian akuntansi serta pelaporan, serta 2.791 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan serta belanja.

Tabel 1.1
Permasalahan Utama SPI Pada Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi serta pelaporan	1.637
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja	2.791
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	938

Sumber: IHPS I Tahun 2022-www.bpk.go.id

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan penilaiannya pada beberapa elemen, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika mempertimbangkan apakah informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan ialah wajar, BPK RI diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam menyatakan empat pendapat berbeda tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah: Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Opini TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumut. Setelah 5 tahun berturut-turut Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini WDP, Pemerintah Kota Medan telah berhasil mendapatkan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Perwakilan BPK RI Sumut sejak tahun 2020, sesuai tabel 1.2.

Tabel 1.2
Daftar Opini LKPD pada Kota Medan 2017-2021

Entitas Pemerintahan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Medan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: IHPS I Tahun 2021-www.bpk.go.id

Walaupun opini LKPD kota Medan telah mendapatkan hasil WTP apakah LKPD Kota Medan saat ini masih menyajikan laporan keuangan dengan Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dan dengan meningkatnya opini dari WDP ke WTP dari BPK RI untuk Pemerintah Kota Medan saya ingin mengkaji ulang apakah 3 variabel independen yaitu Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan setelah mendapatkan opini WTP.

Pemerintah Provinsi Sumut berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Atas raihan Opini WTP, Gubernur Kota Medan menyampaikan bahwa capaian ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk rakyat.

Selain apresiasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian Opini WTP ini tidaklah sempurna seluruhnya. Menurutnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan, dimana hal tersebut menjadi perhatian bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut. Oleh karena itu kami tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK-RI untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Harapannya kepada segenap aparatur, untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggungjawab dan integritas dengan taat azas dan aturan, sehingga pada tahun mendatang kita bisa mempertahankan opini WTP (sumutprov.go.id).

Penelitian ini adalah replikasi dari Ryan Arista (2018) yang meneliti terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau). Adapun perbedaan penelitian ini terlihat pada perbedaan variabel yang digunakan, seperti menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi variabel independen serta perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian. Alasan saya menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi variabel independen karena pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan, dan juga pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu organisasi.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian adalah apakah kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Pemerintah Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka bisa di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Adanya kelemahan terkait sistem pengendalian akuntansi serta pelaporan yang ditemukan oleh BPK yang menyimpang pada pelaksanaan Audit laporan keuangan pemerintah sehingga yang terjadi sistem akuntansi di Pemerintahan Kota Medan tidak berjalan dengan efektif dan efisien
2. Setelah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan masih berjalan dengan baik?
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk menguji pengaruh kompetensi manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pada OPD Kab/Kota Medan?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pada OPD Kab/Kota Medan?
3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pada OPD Kab/Kota Medan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pada OPD Pemerintah Daerah Kab/Kota Medan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pada OPD Pemerintah Daerah Kab/Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pada OPD Pemerintah Daerah Kab/Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi hubungan antara Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi hubungan antara teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Bagi penulis, menjadi sarana guna meningkatkan serta memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan terhadap respon pemerintah serta masyarakat di Indonesia.
2. Bagi Universitas, berfungsi sebagai sumber tambahan untuk penelitian masa depan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi praktisi, studi ini diperkirakan akan berkembang lebih jauh lagi sebagai sumber informasi dan landasan untuk pembuatan kebijakan, membantu

organisasi mempraktikkan pembebasan di masa depan, dan memberikan dukungan kepada OPD dalam memajukan SDM melalui penggunaan teknologi informasi, membangun negara sistem pembebasan keuangan, serta pengembangan sistem internal atas rangka menaikkan efektifitas serta efisiensi pembebasan.

